

SKRIPSI

**DETERMINASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA PADA TAHUN 2012-2015**



SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

Nama : Minerva Aphrodyte M

NIM :16313053

Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

2019

DETERMINASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA PADA TAHUN 2012-2015

SKRIPSI

Disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1
program studi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama : Minerva Aphrodyte M
Nim : 16313053
Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA

2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi UII. Apabila di kemudian terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya siap menerima sanksi/hukuman sesuai yang berlaku.

Yogyakarta,

Telah disetujui oleh

Dosen pembimbing,

Yogyakarta, 20 Januari 2020.

Penulis,

Unggul Priyadi, DR. M. S. A.



PENGESAHAN

DETERMINASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012-2015

Nama : Minerva Aphrodyte M

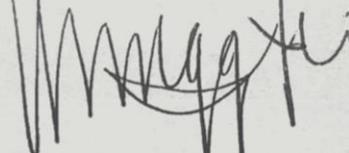
Nim : 16313053

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, *Senin, 20 Januari 2020*

Telah disetujui oleh

Dosen pembimbing,



Unggul Priyadi, DR., M.Si.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**DETERMINASI FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PADA TAHUN 2012-2015**

Disusun Oleh : **MINERVA APHRODYTE M**

Nomor Mahasiswa : **16313053**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 18 Maret 2020

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Unggul Priyadi Dr.,M.Si.

Penguji : Indah Susantun, Dra., M.Si.



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala hormat, rasa bersyukur kepada Allah SWT dan kerendahan hati. Skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Mama yang telah memberikan dukungan baik dukungan secara lisan maupun doa yang selalu diberikan untuk kesuksesan anaknya, karena tanpa doa dari mama aku tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.terimakasih atas semua hal yang engkau berikan kepadaku. Skripsi ini kupersembahkan untuk mama bentuk bakti dan cintaku pada mama.
2. Kak mega, Kak putri dan dek Nabila yang sudah memberikan semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah menjadi penghiburku disaat sedang sedih.
3. Rofiq rafsanjani yang selalu memberikan semangat kepedulian serta perhatian yang membuatku jauh lebih baik dari sebelumnya, dan juga membuat ku semangat selalu.
4. Teman-teman terdekotku yang selalu memberikan semangat serta pelajaran berharga.
5. Dan teman-teman ilmu ekonomi angkatan 16 yang sudah banyak menghibur dan mau menolong di saat aku kesusahan.

HALAMAN MOTTO

1. “Ambilah kebaikan dari apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakannya”
(Nabi Muhammad SAW)
2. “Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)
3. “Jangan kamu merasa lemah dan juga merasa bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”
(Q.S. Ali Imran: 139)
4. “Ketika kita melakukan sesuatu yang baik dan diniatkan karena Allah, maka rintangan seberat apapun akan dapat dilalui,

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas karunia dari Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “determinasi faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2015” dengan baik.

Shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi besar kita baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk yang sebenar-benarnya kepada seluruh umat manusia yang senantiasa kita harapkan syafa'atnya di akhirat. Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini merupakan bentuk awal dari perjuangan yang tanpa dukungan dari pihak-pihak yang bersangkutan skripsi ini tidak dapat selesai.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Jaka Sriyana, SE, M.Si, Ph.D selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Unggul Priyadi, DR., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu serta memberi dukungan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh dosen Dan karyawan UII Yogyakarta yang telah melayani dan memberikan ilmu nya kepada kami.
4. Mama tercinta yang selalu menguatkan serta memberikan kasih sayang, cinta dan perhatian yang tidak terhitung nilainya.

5. Kakak-kakak dan adek tercinta (kak mega, kak putri, dan Nabila) yang telah menjadi semangat.
6. Teman-teman terdekat (salma, nisa, devita) yang telah memberikan motivasi dan dorongan agar terus semangat.
7. Keluarga besar yang ada di jogja, pati terimakasih atas masukan yang mendorong dan memotivasi.
8. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan terimakasih penulis kepada kalian.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan juga motivasi dari pihak-pihak diatas penulis tidak akan sanggup menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karna kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dengan ketidak sempurnaan ini Semoga skripsi ini tetap dapat bermanfaat dan membantu penulis lain serta pembaca.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	Error! Bookmark not defined.
Halaman Pengesahan Skripsi	Error! Bookmark not defined.
Halaman Pengesahan Ujian.....	Error! Bookmark not defined.
Halaman Persembahan	vi
Halaman Motto.....	vii
Halaman Kata Pengantar.....	viii
Halaman Daftar Isi	x
Halaman Daftar Gambar	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xv
Halaman Daftar Tabel	xiii
Halaman Abstrak.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA LANDASAN TEORI	8
2.1. Kajian Pustaka.....	8
2.2. Landasan Teori	11
2.2.1. Pengertian Dana Alokasi Umum.....	11
2.2.2. Pengertian Dana Alokasi Khusus.....	14
2.2.3. Tenaga Medis	17
2.2.4. Pendidikan.....	19

2.3.	Kerangka Pemikiran	23
2.4.	Hipotesis	24
BAB III METODE PENELITIAN.....		26
3.1.	Jenis Data Dan Sumber Data.....	26
3.2.	Definisi operasional Variabel	26
3.3.	Analisis Data	29
3.3.1.	Uji Statistik.....	29
3.3.2.	Model regresi data panel	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		32
4.1.	Analisis Statistik Deskriptif.....	32
4.2.	Hasil Penelitian.....	34
4.2.1.	Deskripsi data.....	34
4.2.2.	Pengujian model regresi data panel.....	44
4.3.	Analisis Antar Kabupaten/Kota di Provinsi DIY	51
4.4.	Pembahasan	53
4.4.1.	Pengaruh DAU Terhadap IPM.....	53
4.4.2.	Pengaruh DAK Terhadap IPM.....	53
4.4.3.	Pengaruh JTM Terhadap IPM.....	54
4.4.4.	Pengaruh JSMA Terhadap IPM	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		56
5.1.	Kesimpulan.....	56
5.2.	Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA		60

LAMPIRAN	62
----------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Indeks Pembangunan Manusia.....	3
1.2. Angka Harapan Hidup DIY 2012-2015	5
2.1. Kajian Pustaka.....	9
4.1. Statistik Deskriptif	32
4.2. Data Indeks Pembangunan Manusia	35
4.3. Anggaran DAU	37
4.4. Anggaran DAK	39
4.5. Jumlah SMA.....	41
4.6. Jumlah Tenaga Medis	43
4.7. Uji Chow	45
4.8. Uji Hausman.....	46
4.9. Model Fixed Effect	47
4.10. Uji Parsial.....	48
4.11. Uji Simultan	49
4.12. Kofisien Determinasi	50
4.13. Koefisien Antar Kabupaten/Kota DIY	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Indeks Pembangunan Manusia di pulau jawa 2012-2015	60
2. Angka Harapan Hidup DIY 2012-2015	61
3. Data IPM provinsi DIY	62
4. Tabel Anggaran DAU	63
5. Anggaran DAK provinsi DIY	64
6. Jumlah SMA Provinsi DIY	65
7. Jumlah Tenaga Medis provinsi DIY	66

Halaman Daftar Lampiran

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), Jumlah sekolah menengah atas (JSMA), Dan jumlah tenaga medis (JTM) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2012-2015. Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana data diambil dari BPS dan website resmi Menteri Keuangan Indonesia. Di dalam penelitian ini menggunakan data kabupaten di DIY sehingga menggunakan regresi panel. Dalam menggunakan panel memilih 3 metode yang terbaik antara *fixed effect*, *random effect* dan *common effect*. Uji analisis dalam penelitian ini melihat uji secara parsial (uji t), simultan (uji f) dan uji determinasi (R²).

Berdasarkan dari regresi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan atau bersama-sama variabel independen dalam hal ini DAU, DAK, JSMA, dan JTM terhadap variabel dependen yaitu IPM adalah positif. Nilai R-squared sebesar 0,998, artinya sebesar 99,87 persen variabel IPM dijelaskan oleh variabel bebasnya sisanya sebesar 0,13 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DAU berpengaruh positif signifikan terhadap IPM di provinsi DIY, variabel DAK tidak signifikan terhadap IPM di Provinsi DIY, Variabel JTM juga tidak signifikan dan variabel JSMA berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

(kata kunci: IPM, DAU, DAK, JSMA, JTM)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di dalam sebuah negara yang sedang berkembang khususnya di Indonesia pembangunan ekonomi merupakan langkah awal untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan juga sebaliknya dengan pertumbuhan ekonomi yang baik maka akan memperlancar pembangunan ekonomi. Selain pertumbuhan ekonomi, kelancaran pembangunan ekonomi juga dipengaruhi oleh pembangunan manusia, dimana kualitas manusia yang baik akan meningkatkan pembangunan ekonomi. Di dalam pembangunan manusia tidak lepas dari peran pemerintah yang ingin mewujudkan kesejahteraan dalam segala aspek khususnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keseimbangan fiskal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat telah diatur dalam UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Indonesia merupakan negara yang besar, maka pemerintah pusat tidak akan dapat menjangkau tiap-tiap daerah yang ada, oleh karena itu, terdapat peran otonomi daerah dimana pemerintah pusat memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah untuk dapat mengurus pemerintahannya secara mandiri, selain itu desentralisasi fiskal juga akan mempengaruhi jalannya otonomi daerah.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa, provinsi DIY merupakan provinsi paling tua kedua setelah Jawa Timur. Yogyakarta terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kotamadya yang dipimpin oleh kesultanan dan pakualam sebagai wakilnya. Yogyakarta dikenal dengan kota

budaya dan juga kota pelajar, karena terdapat setidaknya 137 perguruan tinggi, sekitar 20% rakyat Yogyakarta merupakan pelajar, selain itu kualitas dan akreditasi perguruan tinggi kebanyakan cukup baik, maka hal ini mendorong terciptanya gelar sebagai kota pelajar. Pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta cukup tinggi yaitu sebesar 5,6 persen, inflasi yang stabil mendorong usaha untuk semakin berkembang (Budi, 2018)

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia, *united nations development programme* (UNDP) yang merupakan badan program pembangunan PBB menggunakan indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI) dimana Terdapat beberapa komponen pengukuran penting di dalam mengukur indeks pembangunan manusia, diantaranya angka harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup. Alat ukur ini pertama kali dikenalkan oleh Mahbub ul Haq dan dibantu oleh rekan nya Gustav Ranis. Di Negara Indonesia Indeks Pembangunan manusia dapat digunakan pemerintah untuk mengukur besarnya dana alokasi umum (DAU) yang akan diberikan

Berdasarkan tabel 1.1. ekonomi diatas terlihat bahwa Yogyakarta mendapatkan angka indeks pembangunan yang stabil, dan tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. Itu dapat diartikan bahwa tingkat pelayanan kesehatan, pendidikan kualitas dan standar hidup manusia di kota Yogyakarta cenderung stabil dari tahun ke tahun. Pemerintah tidak hanya memprioritaskan investasi fisik, tetapi juga investasi sumber daya manusia dengan terobosan-terobosan kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang mampu bersaing di dunia internasional (Joko Widodo, 2018).

Berikut ini adalah tabel IPM berdasarkan provinsi di Pulau Jawa:

Tabel 1.1. ____

Indeks Pembangunan Manusia

PROVINSI	2012	2013	2014	2015
DKI JAKARTA	77.53	78.08	78.39	78.99
JAWA BARAT	67.32	68.25	68.8	69.49
JAWA TENGAH	67.21	68.02	68.78	69.49
DI YOGYAKARTA	76.15	76.44	76.81	77.59
JAWA TIMUR	66.74	67.55	68.14	68.95
BANTEN	68.92	69.47	69.89	70.27

Sumber: Publikasi BPS

Pemerintah menginginkan komponen-komponen dalam pengukuran indeks pembangunan manusia seperti angka harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup manusia terus meningkat, tentu saja hal ini berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam rangka mensukseskan otonomi daerah ini, pemerintah Indonesia membuat undang-undang tentang otonomi daerah yaitu Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah kemudian disusul dengan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang berisi tentang dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal secara umum adalah penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan kreatifitas secara efisien di daerah tersebut. Terdapat 3 sumber APBD salah satunya yaitu anggaran pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain (dana hibah, dana darurat). Didalam dana perimbangan di bagi menjadi 3 sumber yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Pendidikan merupakan salah satu dari komponen pengukuran indeks pembangunan manusia, dimana pendidikan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan juga kemiskinan, kemiskinan dapat mempengaruhi pola pikir suatu keluarga bahwa lebih baik bekerja daripada menuntut ilmu, hal ini untuk memperbaiki kondisi keuangan keluarga tersebut, tentunya tidak lepas dari kurangnya pendapatan kepala keluarga untuk membiayai anak mereka bersekolah. Oleh karena itu Dengan adanya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus diharapkan pemerintah dapat mensubsidi dibidang pendidikan sehingga semakin banyak anak yang dapat merasakan sekolah gratis. Standar hidup adalah komponen kedua yang menjadi tolok ukur dalam indeks pembangunan manusia, dimana standar hidup dipengaruhi oleh tingkat pendapatan seseorang, sehingga mendapatkan kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang memenuhi. Yang terakhir adalah harapan hidup manusia, adalah perkiraan tambahan umur seseorang, komponen ini dipengaruhi oleh pelayanan kesehatan di suatu daerah, dimana ketika pelayanan kesehatan baik, maka angka harapan hidup bayi yang baru lahir akan semakin panjang.

Pada tahun 2018 terjadi peningkatan rata-rata IPM sebesar 0,58 dibandingkan dengan tahun 2017, hal ini terjadi karena meningkatnya harapan hidup bayi setelah lahir, harapan lama sekolah dan pengeluaran perkapita atau kualitas hidup masyarakat. Ada perbaikan angka harapan hidup yang ditentukan dari tingkat kematian bayi, kesehatan internal keluarga dan kesehatan lingkungan (kepala BPS Suhariyanto, 2018). Artinya terdapat perbaikan layanan kesehatan pada tahun 2018 dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Yogyakarta

merupakan provinsi dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi, menempati peringkat kedua setelah DKI Jakarta. Berikut tabel IPM di DIY

Tabel 1.2. ____
Angka Harapan Hidup DIY 2012-2015

kabupaten	2012	2013	2014	2015
Kulonprogo	74.58	75.03	74.9	75
Bantul	71.34	71.62	73.24	73.44
Gunungkidul	71.04	71.36	73.39	73.69
Sleman	75.29	75.79	74.47	74.57
Yogyakarta	73.51	73.71	74.05	74.25
D.I. Yogyakarta	73.32	73.62	74.5	74.68
Sumber : publikasi BPS				

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa angka harapan hidup di DIY cukup tinggi dan cenderung stabil, Yogyakarta disebut-sebut mempunyai angka harapan hidup yang paling tinggi (Ardhianti, 2018). Hal ini karena rata-rata angka harapan hidup Indonesia sekitar 70,9 sedangkan Yogyakarta berada pada angka 74,71%. Kalau angka harapan hidup rendah, biasanya karena angka kematian neonatalnya tinggi, begitu juga sebaliknya kalau angka harapan hidup tinggi di suatu daerah berarti angka kematian bayi saat lahir cukup rendah (Ardhiantie, 2018).

Kembali pada DIY, berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa angka harapan hidup kabupaten Sleman paling tinggi diantara kabupaten lainnya, hal ini juga berarti bahwa Sleman mempunyai angka harapan hidup tertinggi di Indonesia. Ini (harapan hidup tinggi karena masyarakat sleman itu sabar, nrimo, legowo, tetapi tetap mau bekerja, mau bergerak. karena kalau kualitas hidup meningkat harapan hidup juga meningkat (Sri Muslimatun, 2019).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan diatas, maka disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh jumlah tenaga medis secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Bagaimana pengaruh jumlah sekolah menengah atas secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
5. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Jumlah Tenaga Medis dan Jumlah Ssekoah Menengah Atas secara simultan atau bersama-sama terhadap IPM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan maslaah diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen secara individu maupun keseluruhan:

1. Untuk menganalisis secara parsial pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Jumlah Tenaga Medis dan Jumlah Ssekoah Menengah Atas secara parsial terhadap IPM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk menganalisis secara bersama-sama atau simultan pengaruh pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Jumlah Tenaga Medis dan

Jumlah Ssekoah Menengah Atas secara parsial terhadap IPM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan pemulis dapat bermanfaat bagi penulis,dan juga para pembaca sehingga manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

Untuk penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan serta ilmu dan belajar untuk merapkan teori-teori yang telah diajarkan dalam materi perkuliahan dengan baik dan benar. Selain itu penulis juga dapat membuka wawasan lebih luas terhadap indeks pembangunan manusia khususnya di provinsi jawa tengah.

2. Bagi pembaca

Bagi pembaca penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pembaca yang ingin mencari data dan juga hubungan antara variable-variable yang telah diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca

3. Bagi pemerintah

Unrtuk pemerintah khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan koreksi dan pertimbangan jika terdapat hal-hal yang belum terjangkau oleh pemerintah,sehingga pemerintah dapat memperbaiki berdasarkan data dan hasil penelitian yang telah disampaikan penulis

BAB II _____

KAJIAN PUSTAKA LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

Dalam upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam penelitian ini maka merujuk pada penelitian terdahulu, adapun penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1...
Kajian Pustaka

NO	Nama Peneliti & Judul	Metode Analisis	Hasil
1	Mohammad Bhakti Setiawan & Abdul Hakim(2013), Penelitian berjudul “Indeks Pembangunan Manusia” https://journal.uny.ac.id/index.php/economia/article/view/1373/1178	<i>Error correction model</i> (ECM) Variable : Ipm , Pdb , Ppn	hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat 2 variable yang berpengaruh signifikan terhadap IPM, yaitu PDB dan PPN Variable PPN berpengaruh signifikan terhadap IPM sebesar 10%,sedangkan, pada variable PDB berpengaruh positif terhadap IPM
2	Zulfikar Mohamad Yamin Latuconsina(2017), Penelitian berjudul “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan dan Regresi Panel” https://journal.ipb.ac.id/index.php/p2wd/article/view/17421/12541	Regresi data panel Variable : kependudukan,kesehatan,pendidikan	Hasil dari penelitian ini adalah untuk dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia pada tipologi I perlu adanya penambahan kesehatan dan tenaga kesehatan, sedangkan pada tipologi II perlu adanya tambahan pendidikan serta askes pelayanan pendidikan
3	Indah Pangesti & Rudy Susanto (2018) , Penelitian berjudul “pengaruh inflasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia” https://journal.ipmmunindra.ac.id/index.php/JABE/article/view/3164/2262	deskriptif kuantitatif,regresi linear berganda Variable : IPM,inflasi	hasil dari penelitian ini adalah ditemukan hubungan negatif antara inflasi dan IPM. ketika inflasi mengalami peningkatan sebesar 1% maka indeks pembangunan manusia akan mengalami penurunan sebesar 0,36%,
4	Eka Pratiwi Lumbantoruan Paidi Hidayat (2014), penelitian berjudul “analisis pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi-Provinsi di	Tipologi klassen Variable : pertumbuhan ekonomi, IPM	hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam uji kointegrasi adanya keseimbangan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dengan indeks pembangunan manusia,selain itu Provinsi di Indonesia yang mengalami

Comment [Office1]: Kok tidka ciocok dengayang ditulis di daftar pustaka

Comment [Office2]: Referensi belum ditulis di daftar pustaka, semua yang dibaca ditulis di daftar pustaka

	Indonesia https://jurnal.usu.ac.id/index.php/edk/article/view/11654/5010		peningkatan Indeks Pembangunan Manusia setiap tahunnya adalah Sulawesi Utara dan yang terendah adalah Papua	Comment [Office3]: Belum ditulis di daftar pustaka
5	Azril Azhari (2011), penelitian berjudul “Pembangunan sumber daya manusia dan indeks pembangunan manusia sektor pertanian” https://jurnal.ugm.ac.id/jieb/article/download/39327/22270	Indeks komposit Variable : Pendidikan, Produktifas tenaga kerja, pendapatan	penelitian ini dapat disimpulkan bahwa provinsi tertinggi urutan IPM adalah DKI sedangkan yang terendah adalah timor timur. Tingginya provinsi DKI dikarenakan nilai indeks komponennya tinggi, berkebalikan dengan timor timur dimana nilai indeksnya rendah	Comment [Office4]: Belum ditulis di daftar pustaka
6	Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto (2010), Penelitian berjudul “pengaruh produk domestik bruto (PDB) dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap angka kemiskinan Indonesia” http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jep/article/view/3610/4117	random effect model Variable : PDRB, IPM	hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa variable yang paling berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan adalah variable IPM	Comment [Office5]: Belum ditulis di daftar pustak

Berdasarkan kajian pustaka, penelitian ini merujuk terhadap penelitian yang diteliti Zulfikar Mohamad Yamin Latuconsina (2017). Dalam penelitian ini terdapat variabel independen Kependudukan, Kesehatan, dan pendidikan, dan variabel dependen IPM. Penelitian ini menggunakan metode panel, dan pendekatan perwilayahan. Dalam penelitian ini hasil yang di dapat perlu adanya penambahan kesehatan dan tenaga kesehatan, Dan perlu adanya tambahan pendidikan serta askes pelayanan pendidikan pada tipologi 1 dan II. Pada penelitian ini tidak menggunakan metode pendekatan perwilayahan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Dana Alokasi Umum

DAU secara umum diartikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang akan disalurkan pada tiap-tiap daerah sesuai dengan proposi dan ketentuan yang telah berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang dana keuangan daerah dan keuangan pusat disebutkan bahwa “dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi” . menurut Bastian (2003: 84) “dana aloaksi umum adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah” . berdasarkan penjelasan para ahli diatas,dana alokasi umum adalah suatu bentuk kepercayaan dan aspirasi yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka untuk meningkatkan kemandirian setiap daerah dan mewujudkan otonomi daerah dan juga desentralisasi fiskal yang efisien.

Salah satu tujuan pemerintah adalah untuk memajukan pembangunan ekonomi di setiap daerah secara merata. Indonesia merupakan sebuah negara yang cukup luas,oleh karena itu pemerintah pusat tidak akan dapat menjangkau seluruh daerah-daerah yang ada di Indonesia, oleh karena itu terciptalah otonomi daerah dimana setiap daerah di berikan hak dan kewajiban untuk mengatur sendiri daerahnya secara mandiri. Untuk mewujudkan peningkatan pembangunan di setiap daerah secara merata hal utama yang menjadi

kunci adalah penyaluran dana dan kas tiap-tiap daerah yang mencukupi. DDU merupakan salah satu komponen dana perimbangan di dalam APBN yang termasuk ke dalam anggaran belanja negara dan merupakan sumber pemasukan di dalam APBD. Dimana pemerintah pusat menyalurkan dana kepada daerah/provinsi dengan tujuan untuk memajukan dan meratakan kemampuan keuangan tiap daerah yang nantinya akan di gunakan secara mandiri oleh pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya. Penyaluran DDU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari total pendapatan dalam negeri.

Dana alokasi umum dialokasikan kepada daerah melalui 2 formula yang terdiri dari celah fiskal dan alokasi dasar. kebutuhan fiskal setiap daerah dihitung berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu, jumlah penduduk, luas wilayah, PDRB perkapita dan indeks pembangunan manusia, sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. Pengalokasian DDU tidak lepas dari peraturan yang diberikan oleh presiden dan dengan tambahan peraturan menteri keuangan. Fungsi dari dana alokasi umum adalah:

- a. Untuk menjaga standar minimum keuangan tiap daerah yang masih kekurangan
- b. Untuk pemeratakan pembangunan ekonomi dalam hal keuangan
- c. Mengatasi masalah dimana tidak semua daerah mampu menghimpun pendapatan, dikarenakan perbedaan daerah dan kondisi daerah yang bervariasi
- d. Mengatasi masalah dimana daerah hanya mampu menguasai sebagian dana dari pemerintah pusat, sehingga dengan adanya dana alokasi daerah dapat

memudahkan pemerintah daerah untuk menyeimbangkan keuangannya dengan pemerintah pusat.

Formulasi dana alokasi umum(DAU):

$$\mathbf{DAU = CF + AD}$$

Keterangan:

DAU = Dana alokasi umum

CF = Celah Fiskal

AD = Alokasi Dasar

Dalam pengalokasian dana alokasi umum terdapat 3 faktor yang perlu diperhatikan,

Yang pertama adalah sumber dana, formula distribusi dan kondisionalitas

1. Sumber dana.

Terdapat beberapa cara untuk menentukan seberapa jumlah dana yang akan dialokasikan ke daerah:

- a. Dapat dihitung melalui proposi penerimaan pemerintah daerah, atau APBD, ketika suatu daerah proposi penerimaan sudah mencapai standar maka pemerintah pusat akan mempertimbangkan berapa jumlah dana yang akan disalurkan.
- b. Berdasarkan suatu formula yang mempertimbangkan faktor-faktor tertentu *by grant to reimburse cost* yang artinya transfer untuk pemerintah daerah yang digunakan untuk menutupi pengeluaran tertentu.

- c. Transfer yang di desain oleh pemerintah pusat yang di dasarkan pada prioritas atau transfer anggaran yang ditujukan untuk tujuan nasional untuk satu tahun anggaran.

2. Formula distribusi.

Faktor formula distribusi merupakan suatu faktor yang penting dalam pengalokasian dana alokasi umum. Dengan formula yang tepat untuk distribusi maka akan mendukung penyaluran dana alokasi umum yang efektif, karena penyaluran disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan disesuaikan dengan potensi sumber daya nya, sehingga ketika formula distribusi tepat, pembangunan ekonomi disuatu daerah akan semakin efektif dan efisien.

3. Kondisionalitas

Dalam faktor kondisionalitas tidak lepas dari tujuan utama pemerintah dalam melakukan pengalokasian dana alokasi daerah, yaitu untuk menstabilkan dan meratakan kondisi keuangan setiap daerah untuk meningkatkan pelayanan dan standar hidup masyarakat di suatu daerah. Potensi dan juga kemampuan daerah yang berbeda-beda menjadi salah satu pertimbangan dalam mengalokasikan DAU. kondisi antara daerah yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama, sehingga pemerintah perlu memperhatikan kondisi lingkungan dan juga potensi-potensi yang ada di setiap daerah demi tercapainya desentralisasi fiskal yang efektif dan juga efisien.

2.2.2. Pengertian Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus(DAK) atau *special allocation fund* secara umum adalah anggaran dana yang bersumber dari APBN, yang di berikan atau

dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kegiatan khusus dan spesial dan merupakan urusan pemerintah daerah. Dana alokasi khusus ini ditujukan untuk membiayai pelayanan publik dan infrastruktur yang belum memenuhi standar minimal, guna untuk membantu mendorong pembangunan di daerah tersebut. DAK diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, penetapan besaran dana alokasi DAK tiap daerah berdasarkan peraturan menteri keuangan, jika dana sudah ditetapkan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, kemudian menteri teknis akan menyusun rencana penggunaan DAK agar dapat efisien dan efektif, setelah rencana penggunaan DAK selesai, dikoordinasikan kepada menteri dalam negeri.

Di dalam APBD terdapat 3 komponen penting, Pendapatan asli daerah (PAD), Dana perimbangan, dan lain-lain. Dana perimbangan adalah dana yang dialokasikan kepada tiap-tiap daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka melaksanakan proses desentralisasi. Di dalam dana perimbangan terdapat 3 sumber, DAK, DAU dan dana bagi hasil. Daerah yang akan mendapatkan DAK harus memenuhi 3 kriteria, yaitu kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Untuk menentukan berapa jumlah penerimaan dana alokasi khusus setidaknya juga melibatkan beberapa menteri, yaitu menteri keuangan, menteri dalam Negeri dan menteri Negara perencanaan pembangunan nasional.

Kriteria khusus akan dilihat berdasarkan otonomi khusus dan karakteristik pada tiap-tiap daerah, dalam hal ini menteri keuangan akan meninjau dengan indeks kewilayahan dan kemudian mempertimbangkan usulan

dari menteri Negara perencanaan pembangunan nasional, sedangkan kriteria umum ditinjau dari kemampuan daerah menghimpun dana pemasukan APBD dan di kurangi oleh belanja pegawai negeri sipil daerah. Keuangan pada tiap-tiap daerah dapat dilihat berdasarkan indeks fiskal netto, sehingga jumlah penerimaan DAK itu berdasarkan minimal indeks fiskal netto yang ditetapkan tiap tahunnya. Yang kriteria teknis, kriteria ini dihitung berdasarkan indikator-indikator khusus yang nantinya akan di biyai oleh DAK,kriteria ini melibatkan 2 menteri dimana menteri teknis akan merumuskan indeks teknis yang kemudian disampaikan kepada menteri keuangan,sehingga menteri keuangan dapat merencanakan jumlah dana alokasi khusus yang akan di alokasikan kepada daerah tersebut.

Dana alokasi khusus di utamakan untuk mendanai 16 bidang khusus yang akan diperbaiki oleh pemerintah daerah , yaitu:

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Infrastruktur jalan.
4. Infrastruktur irigasi.
5. infrastruktur air minum.
6. Infrastruktur sanitasi.
7. Prasarana pemerintah.
8. Kelautan dan perikanan.
9. Pertanian.
10. Lingkungan hidup.
11. Keluarga berencana.

12. Kehutanan.
13. Perdagangan.
14. Sarana dan prasarana daerah tertinggal.
15. Listrik pedesaan.
16. Perumahan dan pemukiman.

Bidang-bidang diatas adalah bidang yang akan dibangun dan perbaiki dengan dana yang bersumber dari DAK.

2.2.3. Tenaga Medis

Pelayanan publik menjadi kunci utama pembangunan manusia di suatu daerah, karena pelayanan publik dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi umum dan lain-lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berupa jasa, barang dan administratif. Pelayanan kesehatan yang buruk akan mempengaruhi angka harapan hidup masyarakat di suatu daerah, oleh karena itu pemerintah daerah harus terus memantau dan memperbaiki pelayanan kesehatan dan juga pelayanan-pelayanan lain agar masyarakat dapat hidup sejahtera.

Berdasarkan Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang kesehatan, di tuliskan bahwa tenaga kesehatan yang termasuk ke dalam golongan tenaga medis terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Di dalam dunia kesehatan pengetahuan dan skill serta pengetahuan tentang kode etik sangatlah penting, karena tanpa pengetahuan dunia

kesehatan tidak akan berjalan lancar. Untuk tenaga medis pengetahuan yang harus di kuasai adalah ilmu kedokteran yang tinggi, karena tidak dapat sembarang dalam memeriksa kesehatan pasien. Menurut PP No.32 Tahun 1996 tenaga medis termasuk ke dalam tenaga kesehatan, sedangkan menurut peraturan Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan menyebutkan yang dimaksud tenaga medis adalah dokter dan dokter gigi, tenaga medis adalah semua yang profesinya di bidang medis seperti dokter dan physician, serta dokter gigi.

Terdapat 2 standar profesi medis yang harus dilakukan yang telah diteapkan oleh menteri kesehatan, yaitu:

1. terdapat suatu alasan atau sebab yang mendasari dilakukannya tindakan medis atau hal ini sering disebut indikasi medis, hal ini dilaksanakan menurut ilmu pengetahuan dan juga pengalaman sehingga suatu tindakan harus dilakukan.
2. yang kedua bagaimana tindakan medis ini dilakukan apakah prosedur yang di laksanakan sudah sesuai dengan standar

Berdasarkan argumen diatas, dapat disimpulkan bahwa tenaga medis termasuk ke dalam tenaga kesehatan dimana yang termasuk ke dalam tenaga medis adalah dokter-dokter yang mempunyai pengetahuan khusus di bidangnya, dan mengabdikan diri mereka ke dalam dunia kesehatan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan. Pembangunan manusia tidak lepas dari peran tenaga medis khususnya pada indikator angka harapan hidup, karena ketika pelayanan kesehatan di suatu daerah baik dan tenaga medis sudah tercukupi angka harapan hidup dapat semakin tinggi dan akhirnya akan mendorong pembangunan manusia.

Pelayanan kesehatan yang baik akan mendorong terciptanya SDM yang berkualitas, dan sehat secara jasmani dan rohani, tenaga medis sangat menentukan kualitas kesehatan di suatu daerah, karena tenaga medis mempunyai peran penting dalam melakukan tugasnya untuk memberikan pelayanan medis pada pasien

2.2.4. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu komponen dari pengukuran indikator pembangunan manusia, selain itu, pendidikan juga merupakan unsur penting dalam pembangunan ekonomi, karena ketika pendidikan di suatu daerah berjalan dengan baik dan kualitasnya memenuhi standar, maka hal itu akan mendorong pembangunan manusia di daerah tersebut. Teori tentang pendidikan mencakup siapa target pendidikan, bagaimana proses pendidikan dapat dijalankan, metode atau cara apa yang digunakan setelah itu yang terakhir bagaimana perkembangannya. Menurut (Rozycky, 1999) didalam pendidikan terdapat beberapa pembahasan-pembahasan penting di dalamnya, antara lain:

1. Pembahasan tentang nilai apa yang layak dalam sebuah proses pendidikan, nilai ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan apa yang layak dipelajari dan apa tujuan serta arah pendidikan.
2. Pembahasan tentang konsep dan jenis pengetahuan, pengetahuan seperti apa yang ada dalam sebuah proses pendidikan, bagaimana sebuah pengetahuan itu ditemukan, apa perbedaannya dengan keyakinan atau pendapat dan seterusnya.
3. Pembahasan tentang hakekat peserta didik dari sisi kemanusiaan, peran dan posisi peserta didik dalam pendidikan, potensi manusia yang belajar dan

Comment [Office6]: Sudah belum?

bagaimana manusia tersebut dapat berkembang dengan potensinya melalui pendidikan.

4. Pembahasan tentang konsep dan hakikat belajar, bagaimana siswa belajar, tujuan belajar metode belajar, konten, serta proses pembelajaran.

5. Pembahasan sekitar target dan sasaran pendidikan, serta peluang dan kesempatan belajar.

Menurut UU No. 2 Tahun 1985 yang membahas tentang tujuan pendidikan, dimana tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Terdapat 3 jenis pendidikan, yaitu pendidikan Formal, pendidikan Non formal, dan pendidikan informal. Pendidikan Formal diantaranya TK, SD, SMA, SMK, perguruan tinggi, Universitas dan masih banyak lagi. Sedangkan pendidikan non formal terdiri dari KB, TPA, lembaga kursus, sanggar, lembaga pelatihan dan lain-lain, dan yang terakhir pendidikan informal misalnya pendidikan agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, sosialisasi. Perbedaan antara pendidikan formal, non formal, dan informal antara lain:

1. Pendidikan formal

Pendidikan formal adalah pendidikan yang terstruktur dan mempunyai tingkatan, mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan atas, dan pendidikan tinggi. Dalam pendidikan formal pemerintah mewajibkan untuk dapat belajar 9 tahun, atau dengan kata lain

minimal pendidikan SMA. Pendidikan formal inilah yang paling berpengaruh terhadap pembangunan manusia.

2. Pendidikan non formal

Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan yang berada diluar lingkup pendidikan formal tetapi juga terstruktur dan berjenjang, hasil penilaian yang diberikan melalui proses pihak berwenang.

3. Pendidikan informal

Pendidikan informal dapat diberikan dari lingkungan dan keluarga, pendidikan ini dijamin yang serba modern ini sangatlah penting untuk di berikan, karena menyangkut pembentukan kepribadian dan adab dalam bermasyarakat.

Pendidikan merupakan peluang bagi suatu negara untuk dapat memajukan menjadi negara maju, karena dengan pendidikan dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berpengetahuan tinggi, sehingga negara tersebut dapat membangun masyarakat. Di Indonesia, merupakan negara berkembang yang sampai saat ini masih mempunyai masalah dalam hal pendidikan, kurang meratanya fasilitas dan kualitas pendidikan di Indonesia menjadikan negara kita menduduki peringkat ke 12 Asia dalam hal daya saing, serta menduduki peringkat ke 37 dari 57 negara yang masuk dalam survey dunia. Faktor utama yang memicu kurangnya pendidikan adalah kemiskinan, dan fasilitas pemerintah yang belum memadai, kemiskinan akan memicu pola pikir suatu keluarga, dimana ketika financial di keluarga itu susah mereka akan memilih dan menyuruh anak mereka untuk bekerja daripada bersekolah. Upaya pemerintah dalam memperbaiki pola pikir tersebut adalah dengan cara

memberikan sekolah gratis pada anak yang kurang mampu, sayangnya fasilitas tersebut belum terlalu merata dan pola pikir untuk bekerja daripada sekolah tetapn belum dapat teratasi, sehingga masalah pendidikan belum sepenuhnya teratasi.

Syarat utama negara yang ingin menjadi negara maju adalah menguasai Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK), dalam hal ini Indonesia masih jelas berada di bawah negara-negara maju lainnya seperti jepang,cina,amerika, dimana penguasaan IPTEK mereka sudah mampu membangun negara, serta kualitas pendidikan yang mereka lakukan sudah sangat baik sehingga mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan cerdas. Indonesia harus segera berbenah, karena mungkin ada yang salah dalam sistem atau cara mengajar yang di lakukan di Indonesia sehingga belum dapat mendorong para generasi untuk mulai mementingkan pendidikan. Bukan hanya dari pemerintah, tetapi masyarakat juga harus membantu memaksimalkan perbaikan pada sektor pendidikan.

Dalam pengambilan kebijakan, terdapat 2 paradigma nasional yang menajdi panutan serta pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, yang pertama paradig fungsional dan paradigma sosialisasi. Paradigm fungsional melihat dari segi kemiskinan dikarenakan negara tersebut tidak memiliki cukup penduduk yang mempunyai pengetahuan, berdasarkan penelitian yang diambil di negara barat, pendidikan formal lah yang mempunyai peran penting dalam membentuk SDM yang berkualitas dan cerdas, karena dalam pendidikan formal terdapat jenjang dan terstruktur sehingga dapat disesuaikan sesuai dengan tingkatannya. Selain paradig fungsional, terdapat paradigma sosialisasi, dalam paradigma

sosialisasi meningkatkan kemampuan masyarakat secara individu dalam bersosialisasi serta lebih peduli terhadap sekitar, kompetensi yang tinggi ini nantinya akan meningkatkan produktifitas.

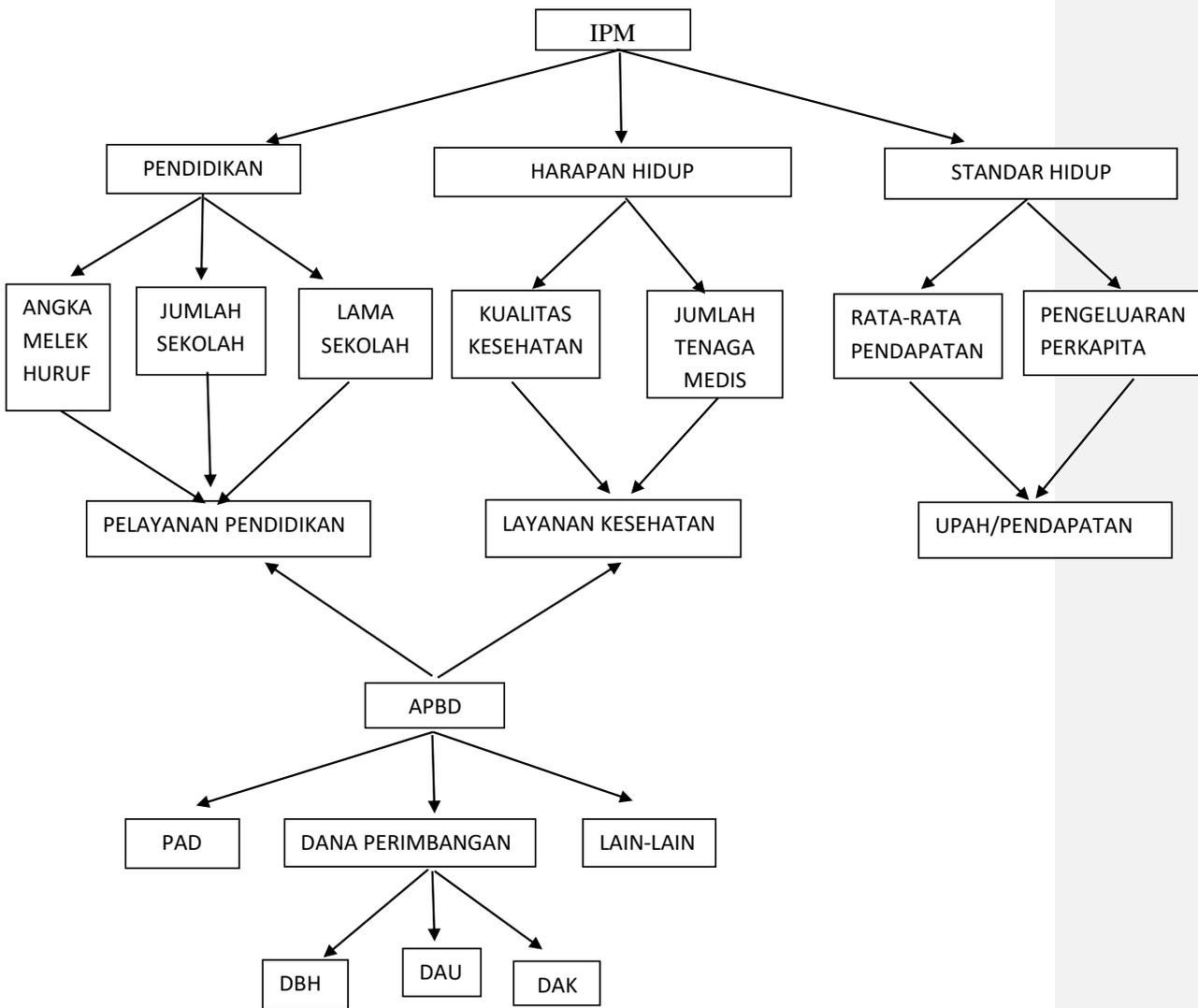
Kedua paradigma diatas telah menciptakan pengaruh yang besar dalam pendidikan, terdapat 2 hal yang yang dapat di ambil dari kedua paradigma ini:

1. Pemerintah menjadikan pendidikan sebagai penggerak pembangunan, sebagai penggerak pembangunan maka dunia pendidikan harus dapat menciptakan inovasi-inovasi baru, melalui sektor pendidikan formal yang tersruktur dan berjenjang, sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM yang baik.
2. Melahirkan sistem pendidikan yang bersifat analisis mekanistik. reduksionisme melihat bahwa pendidikan merupakan suatu barang yang dapat dipisah-pisah dan pecah, sedangkan Mekanis melihat pevahan-pecahan didalam dunia pendidikan berhubungan secara linier.

2.3. Kerangka Pemikiran

Dalam BAB kerangka pemikiran untuk memperjelas logika dan pemikiran di dalam penelitian ini, di perlukan kerangka pemikiran yang di di gambarkan dengan gambar yang saling berkaitan antara variable dependen dengan independen nya, adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran Penelitian



Hipotesis

1. Diduga variabel dana alokasi umum secara parsial berpengaruh positif terhadap IPM.
2. Diduga variabel dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh positif terhadap IPM.
3. Diduga variabel jumlah tenaga medis secara parsial berpengaruh positif terhadap IPM.
4. Diduga variabel jumlah sekolah menengah atas secara parsial berpengaruh positif terhadap IPM.
5. Diduga variabel DAU,DAK,JSMA dan JTM secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap variabel IPM.

BAB III _____

METODE PENELITIAN

Pada BAB ini akan dijelaskan bagaimana cara-cara suatu data akan diolah, menggunakan metode apa saja data akan di analisis, serta sumber dan jenis data yang akan di olah.

3.1. Jenis Data Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana data tidak didapatkan secara langsung, tetapi melalui BPS dan juga jurnal-jurnal terdahulu serta dari publikasi pemerintah yang terpercaya, dari data BPS penulis mendapatkan data tentang IPM, kesehatan dan juga pendidikan, sedangkan dari publikasi pemerintah penulis mendapatkan data tentang DAU dan DAK yang di publikasi secara rutin per periode dan mencakup keseluruhan provinsi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan model data panel karena data yang diambil berdasarkan kabupaten yang ada di provinsi DIY, dimana data panel merupakan gabungan antara data *cross section* dan *time series*, data ini nantinya akan dioalah menggunakan aplikasi eviews untuk mengetahui hubungan antar variable nya.

3.2. Definisi operasional Variabel

1. Variabel dependen.

Variabel dependen merupakan variabel tidak bebas yang nantinya akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah Indeks Pembangunan Manusia, variabel dependen di dapatkan dari situs resmi BPS Yogyakarta, dimana data yang di lampirkan sudah berupa total dari besarnya nilai IPM DIY.

2. Variabel independen.

Variabel independen merupakan variabel bebas yang nantinya akan mempengaruhi variabel dependennya, pada penelitian ini berikut variabel-variabel independennya

a. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum merupakan dana yang masuk dalam komponen belanja di dalam APBN dan merupakan sumber pendapatan pada APBD, Dana alokasi umum di alokasikan dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan ekonomi dan juga untuk memperbaiki pembangunan manusia di tiap-tiap daerah. Dengan adanya Dana alokasi umum ini dapat memicu dan menjadikan otonomi daerah semakin baik serta memperbaiki desentralisasi fiskal yang selama ini sudah di jalankan, oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat memaksimalkan dana yang dialokasikan untuk kepentingan masing-masing daerah.

Dana Alokasi Umum merupakan data sekunder yang didapat berdasarkan website resmi menteri keuangan, Satuan data adalah rupiah. sehingga di perlukan untuk mengubah data tersebut agar lebih mudah di olah, penyerderhanaan angka menggunakan aplikasi excel agar dapat mengolah data dengan mudah.

b. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan komponen dari dana perimbangan bersama DAU, dan juga merupakan sumber dana untuk daerah yang bersumber dari APBN yang masuk ke APBD dengan tujuan pemerataan pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia. Dana alokasi khusus di alokasikan kepada tiap-tiap daerah berdasarkan keputusan para menteri dengan berbagai

pertimbangan, agar dana dapat digunakan secara efisien, dana alokasi khusus di maksudkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan khusus dari pemerintah, misal nya pelayanan kesehatan, pendidikan dan juga perbaikan infrastruktur.

Dana alokasi khusus merupakan data sekunder dimana data didapat berdasarkan web resmi menteri keuangan, dimana satuan data merupakan rupiah. Diperlukan penyederhanaan agar data dapat di olah dengan mudah, penyederhanaan ini menggunakan aplikasi excel untk mempermudah data yang akan diolah.

c. Jumlah sekolah

Jumlah sekolah SMA pada provinsi Yogyakarta menjadi penentu dalam pembangunan manusia, pemerintah mewajibkan masyarakat untuk wajib belajar sembilan tahun, artinya wajib tersebut berakhir di Sekolah menengah atas, beberapa pekerjaan juga mematok persyaratan minimal SMA dalam melamar, sehingga ketika jumlah pelajar yang sudah tamat dan lulus sekolah menengah atas dapat langsung bekerja dan mendapatkan pendapatan, sehingga dapat memperbaiki standar hidup dan kualitas hidup nya. Data jumlah sekolah diambil dari situs resmi BPS Yogyakarta

d. Jumlah tenaga medis

Jumlah tenaga medis di suatu daerah sangat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan di daerah tersebut, tenaga medis yang dimaksud adalah dokter-dokter yang mempunyai kemampuan serta ilmu kedokteran yang khusus, dan memulai praktek bekerja dengan sumpah janji, dengan kata lain pekerjaan tenaga medis bukanlah suatu pekerjaan yang dapat sembarang orang melakukan

nya. Pelayanan-pelayanan dokter ahli ini dapat mempengaruhi haraoan hidup manusia setelah lahir di suatu daerah. Semakin baik pelayanan kesehatan yang di berikan maka akan meningkatkan angka harapan hidup manusia setelah lahir. Semakin lama manusia setelah lahir hidup, maka semakin baik indeks pembangunan manusia nya. Data yang diambil berdasarkan situs resmi BPS Yogyakarta yang dipublikasikan.

3.3. Analisis Data

3.3.1. Uji Statistik

Dalam penelitian ini akan mengetahui bagaimana pengaruh antara variable bebas dengan variable terikat nya , bagaimana variable bebas dapat mempengaruhi dan menjelaskan variable terikatnya , oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan Uji Parsial (uji t), dalam uji parsial kriteria yang diambil dalam mengambil keputusan jika nilai signifikansi $< \alpha$ (0.05) berarti variable independen (DAU,DAK,JSMA, dan JTM) berpengaruh signifikansi terhadap variable dependen (IPM) sedangkan sebaliknya jika nilai signifikansi $> \alpha$ (0.05) maka variable independen (DAU,DAK,JSMA dan JTM) tidak berpengaruh signifikan terhadap variable dependen (IPM).

Selain uji parsial juga diperlukan uji simultan atau dengan kata lain uji F dengan meihat probabilitas. Uji F diperlukan untuk melihat seberapa besar pengaruh keseluruhan dari variable dependen kepada variable independennya. Ketika probabilitas f statistic mempunyai nilai $<$ dari 0.05 maka seluruh variable independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variable dependen nya.

Sebaliknya ketika probabilitas f statistiknya $>$ dari 0.05 maka seluruh variable independen memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap variable dependennya.

Yang terakhir uji koefisien determinan (Uji *R-squared*), uji ini menjelaskan besarnya presentase pengaruh variable independen terhadap variable dependennya secara keseluruhan. Ketika nilai *adjust R-squared* mendekati 0 maka pengaruh antara variable independen terhadap variable dependennya sangat lemah, tetapi ketika nilai *adjust R-squared* mendekati 1 maka pengaruh variable independen terhadap dependennya sangat kuat.

3.3.2. Model regresi data panel.

Terdapat beberapa metode yang dapat di gunakan untuk mengestimasi model menggunakan data panel, diantaranya metode *common effect model*, *random effect model*, dan *fixed effect model*. Untuk menentukan metode yang terbaik terdapat beberapa uji:

a. Common effect

Dalam model common effect ini, adalah model yang paling sederhana, dimana di dalam model ini tidak memperhatikan individu dan juga waktu dari setiap perusahaan, sehingga dapat di asumsikan bahwa perilaku tiap-tiap perusahaan sama rata.

b. Fixed effect

Jika dalam model common dimensi waktu dan individu tidak diperhatikan, maka dalam fixed perbedaan antar individu dapat di intersepkan yaitu dengan teknik dummy.

c. Random effect

Random effect merupakan model dimana dimensi waktu dan dimensi individu saling berhubungan dengan gangguan. Penggunaan random effect model ini adalah untuk menghilangkan masalah heterokedastisitas.

Setelah meregresi model-model diatas selanjutnya adalah memilih model yang tepat untuk data panel, terdapat 2 uji:

a. Uji Chow

Uji chow digunakan untuk menentukan apakah model common lebih baik daripada model fixed

b. Uji Hausman

Uji hausman digunakan untuk menentukan apakah model Random lebih baik daripada model Fixed

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab III telah dijelaskan mengenai deskripsi variable dan metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian untuk menganalisis data dan menguji hipotesis penelitian. Pada bab IV akan dijelaskan dan dijabarkan secara rinci dengan menggunakan tabel beserta hasil intepretasi nya dengan menggunakan statistic deskriptif dan juga pengujian hipotesisnya.

4.1. Analisis Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Dan juga situs resmi menteri keuangan. Data yang diperoleh melalui BPS adalah IPM, JTM, dan JSMA sedangkan data yang diperoleh dari situs menteri keuangan adalah DAU dan DAK.

Tabel 4.1. —
Statistik Deskriptif

variabel	IPM (persen)	DAU(Miliyar Rupiah)	DAK (Rupiah)	JTM (Satuan)	JSMA (satuan)
mean	75,70	756.000.000.000	36.000.000.000	492	8
Min	65,69	531.104.016.000	6.485.350	90	3
Max	84,56	984.410.612.000	72.771.380.000	1.072	15

sumber: olah data sekunder 2019

Berdasarkan data statistik pada tabel diatas yang diolah berdasarkan jumlah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebanyak 4 kabupaten dan 1 kota menyatakan bahwa rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di DIY adalah sebesar 75,70%. Nilai IPM terendah terjadi pada kabupaten gunungkidul pada tahun 2012 yaitu sebesar 65,69%,sedangkan nilai IPM tertinggi terjadi pada tahun 2015 di Kota Yogyakarta yaitu sebesar 84,56%.

Rata-rata Dana Alokasi Umum dalam miliar rupiah adalah sebesar Rp. 756 miliar. Dan pemerintah mengalokasikan dana alokasi paling sedikit untuk daerah kulonprogo pada tahun 2012 sebesar Rp. 531.104.016.000 miliar,sedangkan anggaran pemerintah untuk DAU paling banyak dianggarkan untuk kabupaten sleman pada tahun 2015 sebesar Rp. 984.410.612.000 miliar.

Pemerintah memberi anggaran DAK tertinggi untuk kabupaten gunungkidul pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 72.771.380.000 miliar,dan memberi anggaran terendah pada Kota Yogyakarta pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 6.485.350 juta. Dan rata-rata anggaran DAK untuk provinsi DIY adalah sebesar Rp. 36.000.000.000 miliar.

Jumlah tenaga medis terbanyak di provinsi DIY adalah sebanyak 1.072 yang terjadi di kabupaten sleman pada tahun 2014,dan jumlah tenaga medis paling sedikit sebanyak 90 terjadi pada kabupaten gunungkidul pada tahun 2015. Rata-rata tenaga medis di Provinsi DIY adalah sebesar 492.

Rata-rata jumlah sekolah menengah atas di provinsi DIY adalah sebesar 8, jumlah sekolah menengah atas terendah berada di kabupaten kulonprogo pada

tahun 2012 sebanyak 3, dan jumlah sekolah menengah atas tertinggi yaitu sebanyak 15 pada kabupaten Sleman tahun 2014.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Deskripsi data

1. Tingkat indeks pembangunan manusia periode 2012-2015.

Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator pengukuran tingkat kesejahteraan manusia di suatu negara, IPM sangat berguna bagi pemerintah karena selain untuk mengukur tingkat kesejahteraan juga untuk menentukan besarnya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang harus dianggarkan kepada setiap daerah untuk membangun daerahnya. Terdapat 3 komponen penting didalam IPM yang pertama pendidikan, angka melek huruf dan yang terakhir harapan hidup setelah lahir.

Yogyakarta menempati peringkat 2 dalam tingkat kesejahteraan manusia yang diukur menggunakan IPM di negara Indonesia setelah DKI Jakarta, hal ini dikarenakan tingkat kesejahteraan di provinsi Yogyakarta dari segi biaya hidup yang murah serta kualitas rumah sakit yang memadai cukup bagus. Pada tabel 4.3 berikut akan dilihat secara umum tingkat IPM pada periode tahun 2012-2015 yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 4.2. ____

Data Indeks Pembangunan Manusia (Persen %)

Provinsi DIY	Tahun	IPM
kulon progo	2012	69.74
kulon progo	2013	70.14
kulon progo	2014	70.68
kulon progo	2015	71.52
Bantul	2012	76.13
Bantul	2013	76.78
Bantul	2014	77.11
Bantul	2015	77.99
Gunungkidul	2012	65.69
Gunungkidul	2013	66.31
Gunungkidul	2014	67.03
Gunungkidul	2015	67.41
Sleman	2012	80.10
Sleman	2013	80.26
Sleman	2104	80.73
Sleman	2015	81.20
kota Yogyakarta	2012	83.29
kota Yogyakarta	2013	83.61
kota Yogyakarta	2014	83.78
kota Yogyakarta	2015	84.56

sumber: BPS Yogyakarta

Berdasarkan tabel diatas dapat ditunjukkan bahwa rata-rata tingkat indeks pembangunan manusia tertinggi berada pada kota Yogyakarta. Dilihat dalam tabel bahwa angka IPM di provinsi Yogyakarta cenderung meningkat dari tahun ke tahun yang menandakan perbaikan terhadap 3 komponen yang mempengaruhi dalam pengukuran IPM. Yaitu pendidikan, tingkat kesehatan dan juga standar hidup yang semakin membaik dari tahun ke tahun

2. Dana alokasi umum DIY periode 2012-2015.

Dana alokasi umum merupakan faktor terpenting dalam membangun perekonomian suatu daerah, dana alokasi umum juga merupakan komponen belanja dalam APBN. Dana yang di salurkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini dimaksud kan untuk memenuhi desentralisasi fiskal,dengan tujuan pemerataan pembangunan dan untuk kesejahteraan sosial. Dana alokasi umum dianggarkan melalui beberapa tahap salah satunya dengan menentukan tingkat IPM di suatu daerah yang akan di berikan DAU. ketika tingkat IPM di suatu daerah tinggi, pemerintah tidak akan terlalu banyak menganggarkan dana untuk daerah tersebut, sebaliknya ketika tingkat IPM di suatu daerah rendah, pemerintah akan menganggarkan dana lebih untuk tujuan pembangunan, karena tingkat IPM yang rendah menggambarkan bahwa di daerah tersebut kekurangan dana untuk mensejahterakan masyarakat nya, dan kurang baiknya fasilitas atau pelayanan public yang diberikan.

Pada tabel 4.3. akan di jabarkan data yang bersumber dari website resmi mentri keuangan dalam menganggarkan dana alokasi umum pada provinsi DIY tahun 2012-2015. Pada tahun 2016 pemerintah menunda dana alokasi umum, pada

tahun 2016 saat itu pemerintah sedang berhemat anggaran karena realisasi penerimaan pajak berada di bawah target.

Tabel 4.3. _
Anggaran DAU (Rupiah)

Provinsi DIY	Tahun	DAU
Kulon Progo	2012	531.104.016.000
Kulon Progo	2013	594.978.790.000
Kulon Progo	2014	639.409.211.000
Kulon Progo	2015	657.260.489.000
Bantul	2012	768.034.584.000
Bantul	2013	854.810.634.000
Bantul	2014	949.252.188.000
Bantul	2015	942.850.827.000
Gunung Kidul	2012	687.944.489.000
Gunung Kidul	2013	779.069.238.000
Gunung Kidul	2014	847.388.294.000
Gunung Kidul	2015	872.566.961.000
Sleman	2012	795.708.767.000
Sleman	2013	891.589.912.000
Sleman	2104	952.102.502.000
Sleman	2015	984.410.612.000
Kota Yogyakarta	2012	536.466.614.000
Kota Yogyakarta	2013	597.212.209.000
Kota Yogyakarta	2014	618.742.352.000
Kota Yogyakarta	2015	622.365.351.000

sumber: website resmi menteri keuangan

Berdasarkan data anggaran dana alokasi umum diatas kabupaten sleman merupakan kabupaten yang menerima dana anggaran tertinggi yaitu pada tahun 2015 yaitu sebesar 984.410.612.000 milyar. Data anggaran dana alokasi umum diatas berkaitan erta dengan pertumbuhan IPM di provinsi Yogyakarta yang

cenderung meningkat tiap tahunnya, dikarenakan provinsi DIY berhasil memanfaatkan dana dari pemerintah untuk membangun kesejahteraan dan membangun daerahnya.

3. Dana alokasi khusus DIY periode 2012-2015.

Dana alokasi khusus merupakan satu kesatuan dari dana alokasi umum dimana sama-sama merupakan dana yang bersumber dari APBN sebagai belanja negara, yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan peraturan nasional dalam rangka pembangunan ekonomi.

Berdasarkan data dana alokasi khusus kota Yogyakarta mendapat anggaran terendah dikarenakan kota Yogyakarta mempunyai sumber pendapatan daerah yang paling tinggi dibanding kota lain, karena kota Yogyakarta merupakan pusat kota dimana semua fasilitas, gedung dan wisata terletak pada Yogyakarta sehingga pemerintah tidak menganggarkan terlalu tinggi untuk DAK kepada Yogyakarta.

Pada tabel 4.4. akan di lihat data anggaran pemerintah yang merupakan DAK untuk provinsi DIY pada tahun 2012-2015 dalam satuan miliar rupiah

Tabel 4.4. _
 Anggaran DAK (Rupiah)

Provinsi DIY	Tahun	DAK
Kulon Progo	2012	45.379.520
Kulon Progo	2013	52.894.140.000
Kulon Progo	2014	47.077.300.000
Kulon Progo	2015	53.805.650.000
Bantul	2012	63.281.450
Bantul	2013	47.196.880.000
Bantul	2014	60.914.370.000
Bantul	2015	61.102.870.000
Gunung Kidul	2012	70.584.420
Gunung Kidul	2013	59.793.058.000
Gunung Kidul	2014	46.172.145.000
Gunung Kidul	2015	72.771.380.000
Sleman	2012	52.237.390
Sleman	2013	50.823.330.000
Sleman	2104	36.504.908.000
Sleman	2015	14.433.000.000
Kota Yogyakarta	2012	6.485.350
Kota Yogyakarta	2013	6.220.630.000
Kota Yogyakarta	2014	2.249.900.000
Kota Yogyakarta	2015	561.100.000

4. Jumlah Sekolah Menengah Atas DIY tahun 2012-2015.

Komponen di dalam pengukuran IPM salah satunya adalah pendidikan, tingkat kualitas pendidikan yang baik akan mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi akan tercapai, sehingga tingkat kesejahteraan sosial IPM juga akan tercapai. Penentu kesejahteraan seseorang berkaitan dengan pendidikan terakhir yang ditempuh, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan terakhir maka pekerjaan yang akan di dapat semakin berkualitas dan pendapatan yang di raih akan mampu memperbaiki standar hidup masyarakat.

Saat ini banyak pekerjaan yang memberi syarat minimal jenjang terakhir SMA untuk dapat mendapatkan pekerjaan, oleh karena itu kualitas dan jumlah sekolah SMA di daerah sangat menentukan standar hidup masyarakat, jika jumlah sekolah SMA di suatu daerah hanya sedikit, maka masyarakat akan sangat terbatas untuk menempuh pendidikan SMA, karena pasti di setiap sekolah mempunyai batas maksimal penerimaan mahasiswa baru, oleh karena itu pastilah terhenti di sekolah menengah pertama dan mencari pekerjaan seadanya atau menganggur, pada tabel 4.5. akan dilihat jumlah sekolah SMA yang ada di provinsi Yogyakarta pada periode 2012-2015.

Tabel 4.5. ...
Jumlah SMA (Unit)

Provinsi DIY	Tahun	JSMA
Kulon Progo	2012	3
Kulon Progo	2013	4
Kulon Progo	2014	4
Kulon Progo	2015	11
Bantul	2012	10
Bantul	2013	12
Bantul	2014	12
Bantul	2015	12
Gunung Kidul	2012	5
Gunung Kidul	2013	5
Gunung Kidul	2014	6
Gunung Kidul	2015	9
Sleman	2012	13
Sleman	2013	14
Sleman	2014	15
Sleman	2015	13
Kota Yogyakarta	2012	6
Kota Yogyakarta	2013	8
Kota Yogyakarta	2014	6
Kota Yogyakarta	2015	10

Data yang diambil dari BPS Yogyakarta diatas menunjukkan jumlah sekolah SMA yang ada di provinsi Yogyakarta. Yogyakarta merupakan kota pelajar dimana kualitas pendidikan yang baik dan juga jumlah pendidikan tidak sedikit. Gunung kidul merupakan kota dimana jumlah sekolah menengah atas nya paling sedikit,karena di sana masyarakat tidak tergerak untuk mengejar pendidikan, sehingga para remaja disana di tuntut bekerja ke kota oleh keluarganya.pendapatan yang diperoleh keluarga juga tidak mencukupi untuk bersekolah sehingga mereka berfikir untuk bekerja karena akan lebih menghasilkan daripada bersekolah. Ini berhubungan dengan tingkat IPM di gunungkidup yang lebih rendah daripada kabupaten lain di provinsi Yogyakarta.

5. Jumlah tenaga medis DIY periode 2012-2015.

Pengukuran indeks pembangunan manusia juga dari angka harapan hidup setelah lahir, oleh karena itu kualitas pelayanan kesehatan yang baik akan menentukan seberapa besar harapan hidup seseorang setelah lahir. Kualitas pelayanan kesehatan di suatu daerah ditentukan oleh jumlah tenaga medis yang terdiri dari dokter umum,dokter gigi,dokter ahli di suatu daerah . ketika jumlah dokter mencukupi maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan semakin maksimal.

Pada tabel 4.6. akan dilihat data yang bersumber dari bps jumlah tenaga medis yang ada di Yogyakarta pada tahun 2012-2015

Tabel 4.6. ____
 Jumlah Tenaga Medis (orang)

Provinsi DIY	Tahun	JTM
Kulon Progo	2012	135
Kulon Progo	2013	208
Kulon Progo	2014	199
Kulon Progo	2015	247
Bantul	2012	329
Bantul	2013	476
Bantul	2014	349
Bantul	2015	511
Gunung Kidul	2012	204
Gunung Kidul	2013	136
Gunung Kidul	2014	94
Gunung Kidul	2015	90
Sleman	2012	577
Sleman	2013	925
Sleman	2014	1.072
Sleman	2015	976
Kota Yogyakarta	2012	981
Kota Yogyakarta	2013	1.015
Kota Yogyakarta	2014	643
Kota Yogyakarta	2015	684

Kota Yogyakarta dan Sleman mempunyai jumlah tenaga medis terbanyak Sleman pada tahun 2014 dan Yogyakarta pada tahun 2013, dikarenakan 2 kota ini merupakan kota besar dan cukup banyak rumah sakit yang berkualitas yang ada di kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman, sehingga orang-orang yang ada di luar dari kabupaten Sleman dan kota Yogyakarta seperti Gunungkidul, Bantul, dan Kulonprogo akan lebih memilih untuk berobat ke kota atau Sleman yang baik kualitasnya. Maka dapat dikatakan angka harapan hidup manusia setelah lahir akan lebih baik di kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman.

4.2.2. Pengujian model regresi data panel

Dalam pemilihan model panel terdapat 3 model yang telah dijelaskan dalam bab 3 yang pertama fixed effect, common effect dan yang terakhir random effect, kemudian dipilih melalui uji Chow dan uji Hausman untuk melihat model yang terbaik untuk penelitian ini.

1. Pemilihan model panel.

Di dalam pemilihan model panel terdapat 2 uji untuk melihat manakah uji terbaik yang akan di gunakan untuk mengestimasi data panel.

a. Uji chow

Uji chow digunakan untuk melihat apakah model common effect lebih baik digunakan daripada model fixed effect

Asumsi:

- Ho: model Common Effect Model yang sesuai
- H1: model Fixed Effect Model yang sesuai
- Apabila probabilitas > 5% maka H0 diterima
- Apabila probabilitas < 5% maka H0 diterima

Tabel 4.7. ...

Uji Chow

Effects Test	Statistics	d.f	Prob
cross-section f	967.059431	(4,11)	0,0000
cross-section chi square	117.309974	4	0,0000

Sumber: output eviews

Pada uji Chow karna nilai probabilitas cross section $0,000 < 0,05$ maka ho ditolak dan H1 diterima, sehingga model yang paling cocok digunakan adalah model fixed effect

b. Uji Hausman

Setelah uji Chow selanjutnya adalah uji Hausman, uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah model fixed effect lebih baik digunakan daripada model random effect.

Asumsi:

- H0: model Random Effect Model yang sesuai
- H1: model Fixed Effect Model yang sesuai
- Apabila probabilitas > 5% maka H0 diterima
- Apabila probabilitas < 5% maka H0 diterima

Tabel 4.8. ...

Uji Hausman

test summary	chi-sq. statistic	chi-sq d.f	prob.
cross section random	3868.237724	4	0

Sumber: output eviews

Pada uji hausman nilai probabilitas adalah $0.000 < 0.05$, artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga uji yang paling baik digunakan adalah uji fixed effect.

2. Model regresi panel fixed effect.

Berdasarkan uji pemilihan model yang telah dilakukan, model yang paling tepat adalah model fixed effect, maka berikut lampiran data fixed effect yang telah diolah menggunakan eviews.

Tabel 4.9. ...
Model Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-135.9190	37.02838	-3.670672	0.0037
LOG(DAU)	7.773851	1.384873	5.613405	0.0002
LOG(DAK)	-0.081112	0.036320	-2.233267	0.0473
JTM	0.000271	0.000216	1.256433	0.2350
JSMA	0.095552	0.033524	2.850304	0.0158

Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.999327	Mean dependent var	75.70300	
Adjusted R-squared	0.998838	S.D. dependent var	6.527767	
S.E. of regression	0.222536	Akaike info criterion	0.134710	
Sum squared resid	0.544747	Schwarz criterion	0.582790	
Log likelihood	7.652897	Hannan-Quinn criter.	0.222180	
F-statistic	2042.203	Durbin-Watson stat	2.983629	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Output views 2019

Berdasarkan data fixed effect diatas maka dapat diambil model regresi berganda dari IPM:

$$IPM = \alpha + \beta_1DAU - \beta_2DAK + \beta_3JSMA + \beta_4JTM + e$$

$$IPM = -135.9190 + 7.773851DAU - 0.081112DAK + 0.000271JTM + 0.095552JSMA$$

Keterangan:

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

JSMA = Jumlah Sekolah Menengah Atas

JTM = Jumlah Tenaga Medis

3. Uji statistik.

Setelah melakukan regresi data panel dan memilih model yang terbaik maka selanjutnya adalah melihat pengaruh secara simultan (uji F) pengaruh secara parsial (uji t) dan yang terakhir uji R-square. Berdasarkan pemilihan model, maka dipilih fixed effect yang terbaik

a. Uji parsial (uji t)

Uji parsial dilakukan dengan membandingkan probabilitas signifikansi (p value) dan taraf signifikansi (α). Ketika p value $< \alpha$, maka terdapat pengaruh secara parsial antara variable independen terhadap variable dependen. Sebaliknya ketika p value $> \alpha$, maka tidak terdapat pengaruh secara parsial antar variable independen terhadap variable dependen.

Tabel 4.10. _

Uji Parsial

Variabel	Coefficient	probabilitas
C	-135.9190	0.0037
LOG(DAU)	7.773851	0.0002
LOG(DAK)	-0.081112	0.0473
JTM	0.000271	0.2350
JSMA	0.095552	0.0158

sumber: output evIEWS

- Dengan menggunakan $\alpha=0,05$, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh DAU secara parsial terhadap IPM karena sig 0,0002 $< 0,05$. Nilai koefisien β variable DAU adalah sebesar 7,773851. Tanda positif menjelaskan bahwa

Comment [Office7]: Saya tambahi sehingga kalimat lebih baik

Comment [Office8]: karena

adanya pengaruh yang positif terhadap variable dependennya. Artinya setiap kenaikan DAU sebesar 1 Rupiah maka menyebabkan kenaikan IPM sebesar 7,85%.

Comment [Office9]: dipindah di belakang kalimat...Nilai koefisien dst.

- Dengan menggunakan $\alpha=0,05$, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh DAK secara parsial terhadap IPM karena $\text{sig } 0,1617 > 0,05$. Nilai koefisien β adalah 0,000271 artinya perubahan DAK tidak mempengaruhi IPM
- Dengan menggunakan $\alpha=0,05$, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh JTM secara parsial terhadap IPM karena $\text{sig } 0,4832 > 0,05$, nilai koefisien β adalah 0,000271 artinya perubahan JTM tidak mempengaruhi IPM.
- Dengan menggunakan $\alpha=0,05$, dapat disimpulkan bahwa Ada pengaruh JSMA secara parsial terhadap IPM karena $\text{sig } 0,0020 < 0,05$. Nilai koefisien β untuk variable JSMA adalah sebesar 0,095552. Tanda positif menjelaskan bahwa adanya pengaruh yang positif terhadap variable dependennya artinya setiap kenaikan JSMA sebesar 1 unit akan mengakibatkan kenaikan IPM sebesar 9,55%.

Comment [Office10]: Dioerbaiki seperti di atas

b. Uji simultan (uji F)

Uji simultan dilakukan dengan membandingkan probabilitas F statistic dan taraf signifikansi (α). Ketika $f \text{ statistic} < \alpha$, maka terdapat pengaruh secara simultan antara variable independen terhadap variable dependeden. Sebaliknya ketika $p \text{ value} > \alpha$, maka tidak terdapat pengaruh secara simultan antara variable independen terhadap variable dependen

Tabel 4.11. ...

Uji Simultan

Prob(F-statistic)	0,0000
-------------------	--------

Sumber: ouput eviews

Dengan menggunakan $\alpha = 0,05$ dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secarasimultan variabel DAU,DAK,JTM dan JSMA terhadap IPM, karena nilai probabilitasnya sebesar $0,0000 < 0,05$.

Comment [Office11]: Penulisannya logikanya seperti di uji t

c. Koefisien determinasi (Uji R-square)

Koefisien determinasi atau uji R-square ini, digunakan untuk menegtahui besarnya presentase variable independen yang mempengaruhi variable dependennya.

Tabel 4.12. ___
Kofisien Determinasi

R-Squared	0.999327
adjusted R-Squared	0.998838
S.E. of regression	0.222536
Sum squared resid	0.544747
Log likelihood	7.652897
F-statistic	2042.203
Prob(F-statistic)	0,0000

Sumber: output eviews

Berdasarkan tabel diatas diketahui angka *adjust R Square* adalah sebesar 0.998838, sedangkan angka *R-squared* Adalah sebesar 0.999327 . Berdasarkan teori nilai *R-squared* berkisar antara 0 sampai 1. Ketika nilai atau angka *R-squared* mendekati 0 maka variable independen mmepunyai pengaruh yang lemah terhadap variable dependennya,sebaliknya jika nilai *R-squared* mendekati 1 maka variable independen mempunyai pengaruh yang kuat untuk menjelaskan dependennya. teori menjelaskan bahwa *adjust R-squared* yang paling baik digunakan, karena nilai pada *adjust R-squared* sudah disesuaikan dengan jumlah variable nya.

Dalam data ini, nilai *adjust R-squared* adalah 0.998838, artinya variable dependen IPM dijelaskan oleh variable independen DAU, DAK, JTM dan JSMA sebesar 99,88%,sedangkan sisanya sebesar 0,12% dijelaskan oleh variable lain diluar model regresi. Berdasarkan teori bahwa nilai *adjust R-squared* sebesar 99,87% artinya mendekati 1, maka keempat variable independen yaitu DAU,DAK,JTM dan JSMA mempunyai pengaruh yang kuat terhadap IPM, dan faktor-faktor lain yang belum ada di penelitian ini sebesar 0,13 dapat mempengaruhi pertumbuhan IPM.

4.3. Analisis Antar Kabupaten/Kota di Provinsi DIY

Berdasarkan penelitian diatas, dapat dipilih data terbaik adalah fixed, sehingga dapat ditunjukkan perbedaan intersep setiap kabupaten di Provinsi DIY. Dapat dilihat berdasarkan penjelasan dibawah ini.

Tabel 4.13. ____
Koefisien Antar Kabupaten/Kota DIY

Kabupaten/Kota	CROSS ID	KOEFISIEN C	INTERSEP
Kulon Progo	-3.4553	70.13471	66.67941
Bantul	0.06213	70.13471	70.19684
Gunung Kidul	-8.8816	70.13471	61.25311
Sleman	2.9549	70.13471	73.08961
Kota Yogyakarta	9.31989	70.13471	79.4546

sumber oleh data sekunder 2019

Dari data hasil regresi diatas dapat ditunjukkan bahwa masing-masing kabupaten memiliki perbedaan intersep, artinya masing-masing kabupaten mempunyai tingkat IPM yang berbeda. Tingkat IPM tertinggi ada pada Kota Yogyakarta sebesar 79.4546, artinya jika nilai DAU, DAK, JTM dan JSMA bernilai konstan, maka tingkat IPM di Kota Yogyakarta sebesar 79.4546. Yogyakarta memiliki tingkat IPM tertinggi di Provinsi DIY karena Yogyakarta adalah ibukota dari Provinsi DIY, dimana seluruh kegiatan pemerintah, wisata dan industri ada di Yogyakarta, selain itu hidup di Yogyakarta cenderung murah, dan orang-orang yang ramah menjadikan kesejahteraan baik secara ekonomi maupun sosial nya tinggi, karena itu para wisatawan akan tertarik untuk mengunjungi Yogyakarta.

Provinsi Gunungkidul menjadi Provinsi dengan tingkat IPM terendah selama tahun 2012-2015 yaitu sebesar 61.25311, artinya ketika variabel DAU, DAK, JTM dan JSMA bernilai konstan maka tingkat IPM di provinsi GunungKidul adalah sebesar 61.25311. GunungKidul menjadi Kabupaten terendah tingkat IPM di provinsi DIY karena angka harapan hidup, dan kesejahteraan maanusia nya sangat rendah, pada tahun 2015 terdapat banyak kasus bunuh diri masal di GunungKidul yang menjadi *trend*

di masyarakat sekitar, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan dan perekonomian di sana masih sangat kurang dari segi ekonomi maupun sosial.

4.4. Pembahasan

4.4.1. Pengaruh DAU Terhadap IPM

secara keseluruhan variabel dana alokasi umum mempunyai pengaruh yang penting bagi IPM, karena anggaran dana alokasi umum di berikan untuk tujuan pembangunan secara mandiri berdasarkan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah tersebut tanpa ada kepentingan dari pemerintah pusat, sehingga pembangunan tersebut dapat memicu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akhirnya memicu kenaikan tingkat indeks pembangunan manusia di daerah tersebut.

4.4.2. Pengaruh DAK Terhadap IPM

DAK tidak signifikan terhadap IPM IPM karena proposi dana DAK dianggarkan masih sangat rendah dibandingkan dengan DAU. Dimana DAK merupakan sumber pembiayaan yang bertujuan untuk membiayai pembangunan yang merupakan prioritas nasional seperti infrastruktur di daerah tersebut, pendidikan dan juga kesehatan sehingga dana anggaran yang masih sedikit belum mampu menunjang kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan dan ekonomi di DIY. Hasil ini didukung oleh penelitian Siswandi(2015) dan puji lestari yang menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif tidak signifikan.

4.4.3. Pengaruh JTM Terhadap IPM

Jumlah tenaga medis tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM karena pada era ini sudah banyak pengobatan-pengobatan alternatif di daerah-daerah. Pengobatan alternatif adalah pengobatan yang tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan, hanya berdasarkan ramuan atau cara-cara tradisional yang turun menurun. Hal ini membuat jumlah tenaga medis di tiap-tiap rumah sakit atau praktek daerah tidak begitu berpengaruh dalam peningkatan IPM. Asumsi ini didukung berdasarkan data yang di katakan ketua asosiasi rumah sakit yaitu sebanyak 60 persen masyarakat Indonesia yang sakit hanya 30 persen yang memilih untuk berobat ke dokter, sisanya sebanyak 40 persen memilih pengobatan alternatif.

4.4.4. Pengaruh JSMA Terhadap IPM

JSMA mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap IPM karena berdasarkan realita yang terjadi, hampir seluruh pekerjaan mensyaratkan lulusan minimal SMA sederajat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, lulusan pendidikan di bawah SMA mendapatkan pekerjaan yang penghasilannya tidak akan mencukupi kebutuhan hidup. Semakin tinggi lulusan pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula pendapatan dan pekerjaan yang akan didapat. Oleh karena itu jumlah sekolah menengah atas berpengaruh signifikan, semakin banyak jumlah sekolah menengah atas yang ada di suatu daerah, maka akan semakin banyak masyarakat yang terpicu untuk bersekolah, sehingga akan

Comment [Office12]: Tidal perlu ditulis lagi

Comment [Office13]: Pengaruh yang signifikan terhadap IPM

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang dan meningkatkan IPM serta menciptakan SDM yang berkualitas.

BAB V —

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut

5.1. Kesimpulan

1. Secara simultan variabel dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), jumlah tenaga medis (JTM), dan jumlah sekolah menengah atas (JSMA) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Variable indeks pembangunan manusia (IPM) .
2. Dana alokasi umum mempunyai pengaruh signifikan positif secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia
3. Dana alokasi khusus tidak mempunyai pengaruh negatif secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia
4. Jumlah tenaga medis tidak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia
5. Jumlah sekolah menengah atas mempunyai pengaruh signifikan positif secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia
6. Tingkat indeks pembangunan manusia di Provinsi Yogyakarta meningkat setiap tahunnya, yang artinya seluruh kebijakan pemerintah mengalami perbaikan dan peningkatan tiap tahunnya. Kebijakan pemerintah tersebut adalah memperbaiki mutu Pendidikan, memperbaiki kualitas layanan kesehatan dan menambah kesempatan kerja untuk menunjang kehidupan yang lebih layak.

Comment [Office14]: Ditulis poin poin, satu persatu menjawab hipotesis, kalimat lugas jangan mengulang ulang

7. Yogyakarta mempunyai rata-rata IPM tertinggi pada provinsi DIY yaitu sebesar 79.45 dan Gunungkidul mempunyai rata-rata terendah pada Provinsi DIY sebesar 61.25

5.2. Saran

1. Untuk meningkatkan tingkat IPM di suatu daerah, pemerintah dalam mengalokasikan dan meratakan kesejahteraan dengan pemberian dana yang ditujukan untuk pembangunan. Dana anggaran untuk pembangunan tersebut harus di gunakan secara efektif dan efisien mungkin berdasarkan kebutuhan masyarakat,dan tidak bercampur kepentingan pemerintah, karena apa yang di butuhkan pemerintah belum tentu menjadi kebutuhan masyarakat. pemerintah perlu mengkaji ulang tiap-tiap daerah yang membutuhkan dana tambahan untuk pembangunan. Alokasi dana yang sesuai dengan yang dibutuhkan akan meratakan pembangunan dan akhirnya tercapai kesejahteraan masyarakat,sehingga IPM yang tinggi akan tercapai.
2. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan di tiap-tiap daerah, karena jumlah sekolah berpengaruh signifikan terhadap IPM. Kualitas layanan pendidikan yang baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang,karena akan membuka peluang untuk bekerja dengan layak,dan mendapatkan pendapatan yang dapat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga standar hidupnya akan meningkat.

Comment [Office15]: meningkat

3. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, jumlah tenaga medis tidak signifikan artinya sudah banyak alternatif-alternatif pengobatan yang ada, sehingga masyarakat tidak lagi menggantungkan kesehatan pada dokter-dokter ahli. Tugas pemerintah perlu memeriksa ulang apakah pengobatan-pengobatan alternatif tersebut sudah sesuai dengan standar kesehatan yang ada, dan menetapkan peraturan untuk membatasi pengobatan alternatif yang berbahaya, ataupun yang tidak memenuhi standar kesehatan yang layak.

Comment [Office16]: disebut lengkap jangan disingkat

Comment [Office17]: titik atau koma, setelah titik huruf besar

DAFTAR PUSTAKA

Comment [Office18]: lihat buku panduan, urutan referensi yang ditulis urut abjad

- Adabiyah. (2015), “estimologi partisan pendidikan liberal” Jurnal Islam.
- Ananda, D. (2016), “Pengaruh dana alokasi umum, jumlah penduduk, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal di kabupaten kota Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah” Skripsi. Fakultas ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Azhari, A (2011), “Pembangunan sumber daya manusia dan indeks pembangunan manusia sektor pertanian” , Jurnal ekonomi dan Bisnis Indonesia Volume 15. No. 1, 56-69
<https://jurnal.ugm.ac.id/article/download/39327/22270>
- BPS. (2014), “Indeks Pembangunan Manusia 2014 Metode Baru” . Badan Pusat Statistika, Jakarta.
<https://ipm.bps.go.id/data/provinsi/metode/baru/3400>
- Hidayat, E.P.LP. (2014), “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia(IPM) Provinsi Indonesia”. Jurnal ekonomi dan keuangan volume 2. No. 2
<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/edk/article/view/11654/5010>
- KOMPAS.com(2018). “Pertumbuhan Ekonomi DIY hingga 6,5 persen di 2018”., dari <https://yogyakarta.kompas.com/>
- Katadata.co.id(2018).”Indeks Pembangunan Manusia 2018 Meleset target pemerintah”., dari <https://katadata.co.id/berita/2019/>
- Latuconsina, Z.M.Y. (2017), “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia kabupaten malang berbasis pendekatan perwilayahan dan regresi panel”, jurnal regional, Volume 1, No. 2,202-216.
<https://journal.ipb.ac.id/index.php/p2wd/article/view/17421/12541>
- Noor, A. (2018), “Analisis regresi data panel dengan pendekatan common effect model (CEM), Fixed effect model(FEM) Dan random effect model(REM)”, Skripsi. Jurusan statistika fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam Universitas Islam Indonesia..
- Pangesti, I. & R. Susanto (2018), “pengaruh inflasi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia”, jurnal bisnis dan ekonomi, Volume 5, No. 1, 70-81
<https://journal.ipmmunindra.ac.id/index.php/JABE/article/view/3164/2262>

- Rismoyo, A. (2017), “analisis manfaat ekonomi usaha pengelolaan daur ulang sampah (studi kasus pada bank sampah “PAS” Kelurahan Arcawinangun Kota Purwokerto) Skripsi. Fakultas ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Rosadi, D. (2011), “ekonometrika & analisis runtun terapan dengan R.” Yogyakarta, C.V. Andi Offset.
- Suara.com(2018). “angka harapan hidup tertinggi di Indonesia ada di Yogyakarta”., dari <https://www.suara.com/lifestyle>
- Setiawan, M.B & A. Hakim (2013). “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Indonesia periode 2008-2012”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan. <https://journal.uny.ac.id/index.php/economia/article/view/1373/1178>
- Suliswanto, M.S.W. (2010), “Pengaruh domestic bruto dan indeks pembangunan manusia terhadap angka kemiskinan di Indonesia”, jurnal ekonomi pembangunan, Vol. 8, No.2 <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jep/article/view/3610/4117>
- Utomo, W. (2001), “peranan dan strategi peningkatan PAD dalam pelaksanaan Otonomi Daerah”, Yogyakarta, Pustaka pelajar
- Winarno, W.W. (2009), “Analisis ekonometrika dan statistika dengan eviws edisi kedua”, unit penerbit dan percetakan, Yogyakarta.
- Yusran, M. G. (2017), “faktor-faktor yang mempengaruhi IPM dengan menggunakan analisis regresi panel” Skripsi. Jurusan Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia

LAMPIRAN

Lampiran 1. _____

Indeks Pembangunan Manusia di pulau jawa 2012-2015

PROVINSI	2012	2013	2014	2015

DKI JAKARTA	77.53	78.08	78.39	78.99
JAWA BARAT	67.32	68.25	68.8	69.49
JAWA TENGAH	67.21	68.02	68.78	69.49
DI YOGYAKARTA	76.15	76.44	76.81	77.59
JAWA TIMUR	66.74	67.55	68.14	68.95
BANTEN	68.92	69.47	69.89	70.27

Lampiran 2. Angka Harapan Hidup DIY 2012-2015

Angka Harapan Hidup DIY 2012-2015

kabupaten	2012	2013	2014	2015
Kulonprogo	74.58	75.03	74.9	75
Bantul	71.34	71.62	73.24	73.44
Gunungkidul	71.04	71.36	73.39	73.69
Sleman	75.29	75.79	74.47	74.57
Yogyakarta	73.51	73.71	74.05	74.25
D.I. Yogyakarta	73.32	73.62	74.5	74.68
Sumber : publikasi BPS				

Lampiran 3. Data IPM provinsi DIY

Data IPM provinsi DIY

Provinsi DIY	Tahun	IPM
Kulon Progo	2012	69.74
Kulon Progo	2013	70.14
Kulon Progo	2014	70.68
Kulon Progo	2015	71.52
Bantul	2012	76.13
Bantul	2013	76.78
Bantul	2014	77.11
Bantul	2015	77.99
Gunung Kidul	2012	65.69
Gunung Kidul	2013	66.31
Gunung Kidul	2014	67.03
Gunung Kidul	2015	67.41
Sleman	2012	80.10
Sleman	2013	80.26
Sleman	2104	80.73
Sleman	2015	81.20
Kota Yogyakarta	2012	83.29
Kota Yogyakarta	2013	83.61
Kota Yogyakarta	2014	83.78
Kota Yogyakarta	2015	84.56

Lampiran 4. Tabel Anggaran DAU

Tabel Anggaran DAU

Provinsi DIY	Tahun	DAU
kulon progo	2012	531.104.016.000
kulon progo	2013	594.978.790.000
kulon progo	2014	639.409.211.000
kulon progo	2015	657.260.489.000
Bantul	2012	768.034.584.000
Bantul	2013	854.810.634.000
Bantul	2014	949.252.188.000
Bantul	2015	942.850.827.000
Gunungkidul	2012	687.944.489.000
Gunungkidul	2013	779.069.238.000
Gunungkidul	2014	847.388.294.000
Gunungkidul	2015	872.566.961.000
Sleman	2012	795.708.767.000
Sleman	2013	891.589.912.000
Sleman	2104	952.102.502.000
Sleman	2015	984.410.612.000
kota Yogyakarta	2012	536.466.614.000
kota Yogyakarta	2013	597.212.209.000
kota Yogyakarta	2014	618.742.352.000
kota Yogyakarta	2015	622.365.351.000

Lampiran 5. Anggaran DAK provinsi DIY

Anggaran DAK provinsi DIY

Provinsi DIY	Tahun	DAK
Kulon Progo	2012	45.379.520
Kulon Progo	2013	52.894.140.000
Kulon Progo	2014	47.077.300.000
Kulon Progo	2015	53.805.650.000
Bantul	2012	63.281.450
Bantul	2013	47.196.880.000
Bantul	2014	60.914.370.000
Bantul	2015	61.102.870.000
Gunung Kidul	2012	70.584.420
Gunung Kidul	2013	59.793.058.000
Gunung Kidul	2014	46.172.145.000
Gunung Kidul	2015	72.771.380.000
Sleman	2012	52.237.390
Sleman	2013	50.823.330.000
Sleman	2104	36.504.908.000
Sleman	2015	14.433.000.000
Kota Yogyakarta	2012	6.485.350
Kota Yogyakarta	2013	6.220.630.000
Kota Yogyakarta	2014	2.249.900.000
Kota Yogyakarta	2015	561.100.000

Lampiran 6. Jumlah SMA Provinsi DIY

Jumlah SMA Provinsi DIY

Provinsi DIY	Tahun	JSMA
Kulon Progo	2012	3
Kulon Progo	2013	4
Kulon Progo	2014	4
Kulon Progo	2015	11
Bantul	2012	10
Bantul	2013	12
Bantul	2014	12
Bantul	2015	12
Gunung Kidul	2012	5
Gunung Kidul	2013	5
Gunung Kidul	2014	6
Gunung Kidul	2015	9
Sleman	2012	13
Sleman	2013	14
Sleman	2014	15
Sleman	2015	13
Kota Yogyakarta	2012	6
Kota Yogyakarta	2013	8
Kota Yogyakarta	2014	6
Kota Yogyakarta	2015	10

Lampiran 7. Jumlah Tenaga Medis provinsi DIY

Jumlah Tenaga Medis provinsi DIY

Provinsi DIY	Tahun	JTM
Kulon Progo	2012	135
Kulon Progo	2013	208
Kulon Progo	2014	199
Kulon Progo	2015	247
Bantul	2012	329
Bantul	2013	476
Bantul	2014	349
Bantul	2015	511
Gunung Kidul	2012	204
Gunung Kidul	2013	136
Gunung Kidul	2014	94
Gunung Kidul	2015	90
Sleman	2012	577
Sleman	2013	925
Sleman	2014	1.072
Sleman	2015	976
Kota Yogyakarta	2012	981
Kota Yogyakarta	2013	1.015
Kota Yogyakarta	2014	643
Kota Yogyakarta	2015	684